



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pusat Perkantoran Telp/ 0553-2022689
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM
NOMOR : 180/12/HK/II/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas SAKIP pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau;

b. bahwa pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan

12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 75).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/735/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Bagian Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP Bagian Hukum;
- b. Merumuskan dan menyusun kebijakan, aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP Bagian Hukum;
- c. Melaksanakan penerapan SAKIP Bagian Hukum yang dipimpin oleh Anggota Tim serta melaporkan kinerjanya setiap tahun melalui Pelaporan Kinerja OPD kepada Bupati Cq Kepala Bagian Organisasi.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum.

KETIGA : Satuan Tugas SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEMI, SH., M.Si.

NIP. 19690627 200312 1 008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM NOMOR :
180/12/HK/II/2018 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2018**

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BAGIAN HUKUM**

NO	JABATAN DALAM SATGAS SAKIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggungjawab	Kepala Bagian Hukum
2	Ketua Tim	Kasubag Bantuan Hukum
3	Wakil Ketua	Kasubag Dokumentasi Hukum
4	Sekretaris	Kasubag Hukum dan Perundang - Undangan
5	Admin	1. Penyusun Rencana Hukum
6	Anggota	2. Penyusun Rancangan Perundang - Undangan
7	Anggota	3. Pengelola Informasi Produk Hukum
8	Anggota	4. Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang Undangan

Malinau, 13 Februari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEMI, SH., M.Si.
NIP. 19690627 200312 1 008